

Article History: Received: 2 September 2025, Revision: 1 January 2026, Accepted: 10 January 2026, Available Online: 1 April 2026.

DOI: <https://doi.org/10.35870/emt.v10i2.5476>

Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2019-2023

Dona Tasyati Rahmadani ^{1*}, Firmanyah ², Sri Hartaty ³

^{1*,2,3} Politeknik Negeri Sriwijaya, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

Corresponding Email : donatasya25@gmail.com ^{1*}

Abstrak. Latar belakang pengkajian didasarkan pada kondisi pengelolaan alokasi belanja modal di provinsi-provinsi Pulau Sumatera yang masih belum mencapai tingkat optimal. Tujuannya adalah menganalisis pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap alokasi belanja modal. Pengelolaan PAD yang efektif penting untuk mengurangi ketergantungan pada utang dan menjamin keberlanjutan pembiayaan infrastruktur. Ketergantungan berlebihan pada utang jangka pendek berpotensi menimbulkan risiko fiskal, sehingga efisiensi pengelolaan keuangan diperlukan untuk menjaga stabilitas likuiditas dan investasi jangka panjang. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan, Analisis dilakukan menggunakan pendekatan purposive sampling dan regresi data panel menggunakan perangkat lunak Eviews 12. Hasil analisis adjusted R2 bernilai 0,540432 menunjukkan bahwa 54% variasi Alokasi Belanja Modal dapat diuraikan melalui kontribusi Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, serta Rasio Likuiditas. Untuk penelitian mendatang, disarankan agar memasukkan variabel independen tambahan dan menambahkan jumlah sampel penelitian guna memperluas cakupan analisis empiris.

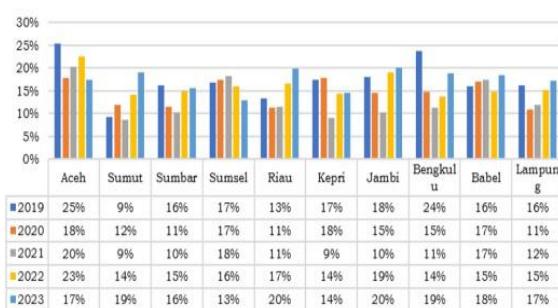
Kata kunci: Rasio Derajat Desentralisasi; Rasio Efisiensi Keuangan Daerah; Rasio Likuiditas; Alokasi Belanja Modal.

Abstract. The background of this research is based on the condition of capital expenditure allocation management in the provinces of Sumatra Island, which has not yet reached an optimal level. The objective is to analyze the influence of the Regional Financial Ratio on capital expenditure allocation. Effective PAD management is important to reduce dependence on debt and ensure the sustainability of infrastructure financing. Excessive dependence on short-term debt has the potential to create fiscal risks, so efficient financial management is needed to maintain liquidity stability and long-term investment. The type of data used is secondary data in the form of financial reports. The analysis was conducted using a purposive sampling approach and panel data regression using Eviews 12 software. The results of the adjusted R2 analysis with a value of 0.540432 indicate that 54% of the variation in Capital Expenditure Allocation can be explained through the contribution of the Degree of Decentralization Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, and Liquidity Ratio. For future research, it is recommended to include additional independent variables and increase the number of research samples to expand the scope of the empirical analysis.

Keywords: Decentralization Degree Ratio; Regional Financial Efficiency Ratio; Liquidity Ratio; Capital Expenditure Allocation.

Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi sekaligus mengelola keuangan secara mandiri. Ketidakseimbangan kapasitas fiskal antar wilayah di Indonesia muncul akibat perbedaan potensi wilayah, kebutuhan, ketersediaan sumber daya, serta beban fungsi antar tingkat pemerintahan (Christia dan Ispriyarno, 2019). Alokasi belanja modal pemerintah daerah diarahkan pada investasi jangka panjang yang berperan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Walaupun berbagai upaya telah dilakukan, pengelolaan dan realisasi belanja modal di tingkat pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.



Gambar 1. Realisasi belanja modal pemerintah provinsi di pulau Sumatera tahun 2019-2023

Peningkatan alokasi anggaran belanja modal dipengaruhi oleh kebutuhan daerah akan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran fungsi pemerintahan serta pelayanan publik. Belanja modal memegang peran strategis dalam pengeluaran daerah karena berdampak langsung pada perkembangan wilayah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Praza, 2019). Pengelolaan PAD yang efektif memungkinkan daerah mengurangi ketergantungan pada utang sekaligus menjaga kesinambungan pembiayaan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur. Ketika PAD meningkat, daerah memiliki kapasitas lebih besar untuk membiayai belanja modal tanpa harus mengandalkan sumber pembiayaan eksternal. Ketergantungan pada utang sering kali mencerminkan ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja modal dan kemampuan daerah menghasilkan

pendapatan sendiri. Ketergantungan berlebihan pada utang jangka pendek berpotensi menimbulkan risiko fiskal di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah dituntut menjalankan kegiatan secara efisien guna mengoptimalkan pelaksanaan program dan pencapaian tujuan bersama. Pengelolaan keuangan yang efisien menjadi krusial agar daerah dapat menjaga keseimbangan antara stabilitas likuiditas dan investasi jangka panjang melalui belanja modal. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan penerimaan untuk belanja yang bersifat produktif, namun realitas menunjukkan bahwa belanja rutin yang relatif kurang produktif masih mendominasi (Kawung dkk, 2018). Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan teori keagenan yang membahas risiko bersama akibat hubungan kemitraan antara prinsipal dan agen. Teori ini menyoroti fenomena budgetary slack, yakni selisih anggaran yang mencerminkan inefisiensi atau potensi kehilangan pendapatan akibat asimetri informasi dalam pengambilan keputusan (Raharjo, 2018). Dalam konteks penelitian ini, pemerintah pusat dan masyarakat berperan sebagai prinsipal, sedangkan pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang menjalankan administrasi pemerintahan sesuai regulasi. Beragam hasil ditemukan dalam penelitian terdahulu.

Mulyani & Fitra (2023) melaporkan bahwa rasio derajat desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap perubahan alokasi belanja modal, sementara Muttaqin (2024) tidak menemukan pengaruh tersebut. Andani (2022) menyatakan rasio efisiensi keuangan memiliki pengaruh signifikan, namun Rohyana & Ramadhanti (2024) memperoleh hasil sebaliknya. Zulkarnain (2020) mengkaji hubungan antara likuiditas daerah dan belanja modal untuk aset tetap dengan harapan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Penelitian ini menitikberatkan pada variabel yang telah dibahas sebelumnya, mengingat adanya ketidakkonsistenan hasil terkait belanja modal. Selain itu, kajian ini juga menguji aspek yang kurang mendapat perhatian, seperti kewajiban jangka pendek yang diukur melalui rasio likuiditas terhadap belanja modal. Fokus utama diarahkan pada analisis pengaruh rasio derajat desentralisasi, efisiensi keuangan daerah, serta likuiditas terhadap alokasi belanja modal pemerintah provinsi di Pulau Sumatera secara simultan maupun parsial.

Tinjauan Literatur

Alokasi Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk pembentukan aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melebihi satu periode anggaran. Rasio belanja modal dihitung dengan membagi realisasi belanja modal terhadap total belanja daerah. Rasio ini digunakan untuk mengukur proporsi anggaran yang dialokasikan pada pembiayaan aset jangka panjang dalam suatu periode fiskal.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi mengukur tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam membiayai pembangunan dan penyediaan layanan publik melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan ketergantungan minimal terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kenaikan rasio ini menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam meningkatkan alokasi belanja modal guna mendukung pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan sebagai implementasi otonomi keuangan daerah (Badriyah, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa rasio ini berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal (Praza, 2019), meskipun Marlianita dan Saleh (2020) menemukan hasil yang tidak signifikan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi keuangan daerah mencerminkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh, sekaligus menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memprioritaskan pengeluaran, terutama antara belanja rutin dan investasi pembangunan (Febriana dkk., 2024). Semakin tinggi rasio efisiensi, cenderung semakin kecil alokasi untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur dan layanan publik. Penelitian oleh Febriana dkk. (2024) menemukan pengaruh nyata rasio efisiensi terhadap belanja modal, sedangkan Rohyana & Ramadhanti (2024) melaporkan tidak ada pengaruh signifikan.

Rasio Likuiditas Keuangan

Rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu serta mencerminkan efisiensi pengelolaan kas daerah. Dalam literatur keuangan daerah, current ratio sering dijadikan indikator utama kesehatan likuiditas. Standar rasio lancar yang dianggap sehat berada pada kisaran 2:1, dengan batas toleransi minimum 1:1. Rasio di bawah angka ini menunjukkan kondisi likuiditas yang kurang sehat dan berpotensi menimbulkan ketidakmampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban jangka pendek secara tepat waktu.

Hipotesis Penelitian

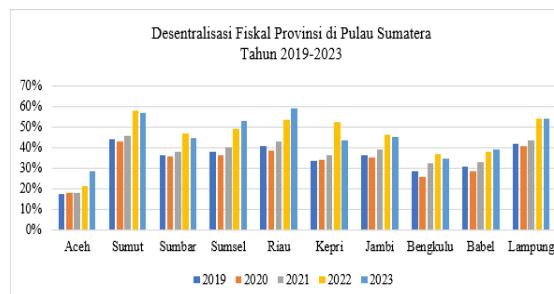
Berdasarkan uraian sebelumnya dan mempertimbangkan ketidakkonsistennan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut (Machali, 2017):

- 1) H1: Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera.
- 2) H2: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera.
- 3) H3: Rasio Likuiditas berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera.
- 4) H4: Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Likuiditas secara bersama-sama berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), berupa laporan keuangan pemerintah daerah provinsi di Pulau Sumatera untuk periode 2019–2023. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, menghasilkan 45 unit observasi yang memenuhi kriteria, yaitu sembilan provinsi selama lima tahun. Kriteria utama dalam penentuan sampel

adalah laporan keuangan pemerintah provinsi di Pulau Sumatera yang memiliki tingkat desentralisasi fiskal yang relatif setara.



Gambar 2. Derajat Desentralisasi pemeritah Provinsi di pulau Sumatra Tahun 2019-2023

Beberapa daerah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan daerah yang memiliki tingkat desentralisasi di atas 40% dikategorikan dalam kondisi baik (Mahmudi, 2016). Provinsi Aceh dikeluarkan dari sampel penelitian karena

tingkat desentralisasinya jauh lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Keputusan ini diambil untuk menjaga homogenitas data serta memastikan validitas model regresi yang digunakan. Untuk menggambarkan distribusi unit analisis, penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Metode analisis yang diterapkan adalah regresi data panel dan regresi linier berganda. Selanjutnya, dilakukan pemilihan model panel yang paling sesuai untuk menguji hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Selain itu, pengujian asumsi klasik dan uji hipotesis juga dilaksanakan. Seluruh data yang terkumpul diolah menggunakan perangkat lunak Eviews versi 12. Perhitungan skala rasio untuk masing-masing variabel dilakukan berdasarkan rumus yang akan disajikan pada bagian berikut.

Tabel 1. Indikator Variabel

Variabel	Indikator
RDD	$\text{PAD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
REKD	$= \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
RLK	$= \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \times 100\%$
ABM	$= \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$

RDD : Rasio Derajat Desentralisasi

REKD : Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

RLK : Rasio Likuiditas Keuangan

ABM : Alokasi Belanja Modal

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik deskriptif meliputi

ukuran pemasaran data seperti rata-rata (mean), median, dan modus, serta ukuran penyebaran data seperti standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum. Dengan menggunakan analisis ini, peneliti dapat memahami distribusi dan variasi nilai variabel-variabel penelitian, yaitu Rasio Derajat Desentralisasi (RDD), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD), Rasio Likuiditas Keuangan (RLK), dan Alokasi Belanja Modal (ABM). Hasil analisis ini juga berfungsi sebagai dasar untuk pengujian lebih lanjut dalam model regresi dan uji hipotesis.

Tabel 2. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik	Y	X1	X2	X3
Mean	0.161778	0.413111	0.989333	1.928444
Median	0.150000	0.400000	1.010000	1.740000
Maximum	0.690000	0.590000	1.230000	6.440000
Minimum	0.090000	0.260000	0.200000	0.190000
Std. Dev.	0.087498	0.082622	0.135586	1.439297
Observations	45	45	45	45

- 1) Nilai terendah dari konstruk dependen Alokasi Belanja Modal tercatat sebesar 0,090000, sedangkan nilai terbesar Alokasi Belanja Modal sebesar 0,690000. Rata-rata (mean) Alokasi Belanja Modal tercatat sebesar 0,161778, dengan simpangan baku (standard deviation) sebesar 0,087498.
- 2) Variabel Rasio Derajat Desentralisasi sebagai konstruk independen (X1) memiliki nilai terendah sebesar 0,260000 dan nilai terbesar sebesar 0,590000. Rata-rata (mean) Rasio Derajat Desentralisasi adalah 0,413111, dengan simpangan baku (standard deviation) sebesar 0,082622.
- 3) Variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2) menunjukkan nilai terendah sebesar 0,200000 dan nilai terbesar sebesar 1,230000. Rata-rata (mean) Rasio Efisiensi

Keuangan Daerah tercatat sebesar 0,989333, dengan simpangan baku (standard deviation) sebesar 0,135586.

- 4) Variabel Rasio Likuiditas Keuangan Daerah (X3) mencatat nilai terendah sebesar 0,190000 dan nilai terbesar sebesar 6,440000. Rata-rata (mean) Rasio Likuiditas Keuangan Daerah adalah 1,928444, dengan simpangan baku (standard deviation) sebesar 1,439297.

Uji Model Regresi Data Panel

Untuk mendapatkan model regresi yang paling sesuai dalam merepresentasikan hubungan antar variabel, penelitian ini menerapkan tiga prosedur pengujian spesifikasi model, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (Basuki, 2021).

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.426869	(8,33)	0.8964
Cross-section Chi-square	4.431234	8	0.8163

Hasil uji Chow menunjukkan nilai probabilitas Cross-section F sebesar 0,8964, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa hipotesis nol (H_0)

diterima, sehingga model yang paling representatif dalam mengestimasi persamaan regresi adalah *Common Effect Model* (CEM).

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	2.105789	3	0.5507

Selanjutnya, hasil uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar 0,5507, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini menegaskan bahwa hipotesis

nol (H_0) diterima, sehingga model yang direkomendasikan adalah Random Effect Model (REM).

Tabel 5. Hasil Uji Lagrange Multiplier

Test	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	2.450889	21.72626	24.17715
Prob.	(0.1175)	(0.0000)	(0.0000)

Mengingat hasil pengujian model sebelumnya belum memberikan kesimpulan yang definitif, dilakukan pengujian tambahan menggunakan metode Lagrange Multiplier (LM). Pengujian ini memberikan nilai probabilitas Breusch-Pagan sebesar 0,1175, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Berdasarkan temuan tersebut, hipotesis nol (H_0) diterima, sehingga model yang direkomendasikan adalah *Common Effect Model* (CEM). Merujuk pada hasil ketiga pengujian, model yang teridentifikasi paling representatif adalah *Common Effect Model* (CEM). Oleh karena itu, model ini digunakan sebagai pendekatan estimasi regresi dalam penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Output analisis multikolinieritas menunjukkan besaran korelasi antara variabel-variabel independen (Derajat Desentralisasi X1, Efisiensi Keuangan Daerah X2, dan Likuiditas Keuangan X3) kurang dari 10,00. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari indikasi multikolinieritas pada setiap variabel.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Centered VIF
C	NA
X1	1.020867
X2	1.000024
X3	1.020890

Uji Heteroskedastisitas

Identifikasi heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan prosedur Harvey. Output analisis menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar 0,7254, yang melebihi taraf

signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa model bebas dari indikasi heteroskedastisitas.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Statistik	Nilai	Probabilitas
F-statistic	0.411674	Prob. F(3,41) = 0.7455
Obs*R-squared	1.315876	Prob. Chi-Square(3) = 0.7254
Scaled explained SS	1.035062	Prob. Chi-Square(3) = 0.7928

Uji Autokorelasi

Pendeteksian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan prosedur Durbin-Watson. Nilai uji yang diperoleh sebesar 2,108386 dibandingkan dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, jumlah observasi n

= 45, dan jumlah variabel bebas $k = 3$. Karena nilai tersebut berada dalam interval $[d_U < d_{DW} < 4 - d_U]$ yaitu $[1,6662 < 2,108386 < 2,3338]$, maka model dikategorikan tidak mengandung autokorelasi.

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi

Statistik	Nilai
Mean dependent var	6.21E-17
S.D. dependent var	0.056896
Akaike info criterion	-3.037226
Schwarz criterion	-2.796337

Analisis Regresi Linier Berganda

1) Konstanta (α) sebesar 0,661805 menunjukkan bahwa apabila variabel-

variabel independen bernilai nol, maka Alokasi Belanja Modal mengalami depresiasi sebesar 0,661805 atau 66,1805%. Artinya,

variabel dependen (Alokasi Belanja Modal) tetap dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel independen yang digunakan dalam model.

2) Koefisien regresi variabel Rasio Derajat Desentralisasi (X1) bernilai negatif sebesar -0,035018. Ini berarti setiap kenaikan 1 satuan atau 1% pada Rasio Derajat Desentralisasi akan menyebabkan penurunan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,035018 atau 3,5018%.

3) Koefisien regresi variabel Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2) juga negatif, yaitu

sebesar -0,463123. Artinya, setiap kenaikan 1 satuan atau 1% pada Rasio Efisiensi Keuangan Daerah akan menurunkan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,463123 atau 46,3123%.

4) Koefisien regresi variabel Rasio Likuiditas Keuangan (X3) bernilai negatif sebesar -0,014197. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan atau 1% pada Rasio Likuiditas Keuangan akan menurunkan Alokasi Belanja Modal sebesar 0,014197 atau 1,4197%.

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C (Konstanta)	0.661805	0.081926	8.078040	0.0000
X1 (Rasio Derajat Desentralisasi)	-0.035018	0.109442	-0.319970	0.7506
X2 (Rasio Efisiensi Keuangan Daerah)	-0.463123	0.065958	-7.021488	0.0000
X3 (Rasio Likuiditas Keuangan)	-0.014197	0.006283	-2.259696	0.0292

Tabel 10. Uji Hipotesis

Statistik Lainnya	Nilai
Root MSE	0.056618
R-squared	0.571766
Adjusted R-squared	0.540432
Mean dependent var	0.161778
S.D. dependent var	0.087498
S.E. of regression	0.059316
Akaike info criterion	-2.727188
Schwarz criterion	-2.566596
Hannan-Quinn criterion	-2.667321
Log likelihood	65.36173
F-statistic	18.24736
Prob(F-statistic)	0.000000
Durbin-Watson stat	1.828359

Uji Koefisien Determinasi

Nilai Adjusted R² sebesar 0,540432 menunjukkan bahwa sekitar 54% variasi Alokasi Belanja Modal dapat dijelaskan oleh kontribusi variabel independen yaitu Rasio Derajat Desentralisasi (X1), Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2), dan Rasio Likuiditas (X3). Sedangkan 46% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam analisis.

Uji F (Simultan)

Berdasarkan Tabel 9, nilai F-hitung = 18,2473 dengan probabilitas 0,000000 lebih kecil dari

tingkat signifikansi 0,05, dan jauh melebihi nilai F-tabel (2,8327) pada df1 = 3 dan df2 = 41. Hal ini berarti:

- 1) Hipotesis nol (H₀) ditolak
- 2) Hipotesis alternatif (H₄) diterima

Artinya, secara simultan, variabel-variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Uji T (Parsial)

Berdasarkan hasil Tabel 9, berikut kesimpulan pengujian parsial tiap variabel:

1) Rasio Derajat Desentralisasi (X1)

- a) t-hitung = -0,319970
- b) Probabilitas = 0,7506 > 0,05

Variabel ini tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal. Kesimpulan: Hipotesis H1 ditolak.

2) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (X2)

- a) t-hitung = -7,021488
- b) Probabilitas = 0,0000 < 0,05

Variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Kesimpulan: Hipotesis H2 diterima.

3) Rasio Likuiditas (X3)

- a) t-hitung = -2,259696
- b) Probabilitas = 0,0292 < 0,05

Variabel ini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Kesimpulan: Hipotesis H3 diterima.

Pembahasan

Secara parsial, hasil uji-t menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini mencerminkan bahwa kewenangan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah belum mampu secara efektif mendorong peningkatan investasi publik melalui belanja modal. Sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, yang menyebabkan ruang fiskal daerah menjadi terbatas. Akibatnya, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk pembiayaan operasional rutin sehingga porsi belanja modal menjadi relatif kecil. Keterbatasan kapasitas perencanaan dan pengelolaan keuangan juga menjadi faktor penghambat optimalisasi desentralisasi fiskal. Dengan demikian, derajat desentralisasi yang tinggi tidak otomatis menghasilkan kemandirian fiskal jika tidak diimbangi dengan kemampuan daerah memanfaatkan kewenangan tersebut secara efisien dan strategis. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muttaqin (2024) dan Andriyani dkk (2020) yang menunjukkan bahwa rasio desentralisasi tidak berkontribusi signifikan terhadap belanja modal, meskipun ada

penelitian lain seperti Mulyani & Fitra (2023), Praza (2019), dan Nurhasanah (2022) yang menemukan kontribusi positif dari variabel ini. Sementara itu, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah secara parsial memberikan kontribusi signifikan namun dengan arah negatif terhadap Alokasi Belanja Modal. Ini mengindikasikan bahwa peningkatan efisiensi keuangan daerah cenderung diikuti oleh penurunan alokasi belanja modal. Pemerintah daerah tampaknya lebih memprioritaskan efisiensi anggaran secara keseluruhan, termasuk mengurangi belanja modal yang membutuhkan pembiayaan besar dan waktu pelaksanaan panjang (Supriyanto, 2024). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan efisiensi tanpa perencanaan investasi yang matang berpotensi menurunkan porsi belanja modal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengharmoniskan efisiensi keuangan dan keberlanjutan investasi agar belanja modal tetap menjadi prioritas.

Hasil ini konsisten dengan Indiyanti (2018) yang menemukan dampak negatif efisiensi keuangan terhadap belanja modal, meskipun ada juga studi seperti Andani (2022), Darmastuti (2021), dan Siddiq (2020) yang menunjukkan dampak positif, serta Rohyana & Ramadhanti (2024) dan Fajriati dkk (2022) yang menemukan pengaruh tidak signifikan. Adapun Rasio Likuiditas secara parsial menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Meskipun secara teori likuiditas yang tinggi seharusnya memperluas ruang fiskal dan mempercepat investasi publik (Hutabarat, 2023), kenyataannya ketersediaan kas yang melimpah tidak selalu dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah daerah cenderung menjaga posisi kas aman sebagai bentuk pengendalian fiskal jangka pendek, sehingga alokasi belanja modal justru menurun. Temuan ini sejalan dengan studi Ritonga (2016) dan Zulkarnain (2020) yang membandingkan kemampuan likuiditas dengan besarnya belanja modal pemerintah daerah. Secara simultan, uji-F menunjukkan bahwa ketiga variabel independen tersebut secara kolektif berkontribusi signifikan dalam menjelaskan variasi Alokasi Belanja Modal pemerintah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini memperkuat asumsi bahwa aspek struktural fiskal, efisiensi anggaran, dan kesehatan kas saling terkait dalam memengaruhi

keputusan belanja modal. Meski terdapat variasi hasil pada pengujian parsial, hasil simultan mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap prioritas pengeluaran daerah serta dorongan agar efisiensi dan likuiditas fiskal dapat dioptimalkan untuk mendukung belanja modal produktif sebagai investasi daerah yang berdampak luas bagi masyarakat. Fluktuasi alokasi belanja modal yang terjadi merupakan hasil pengaruh simultan ketiga variabel ini, sesuai dengan temuan Indiyanti dkk (2018), Andriyani dkk (2020), dan Febriana dkk (2024) yang menegaskan peran krusial Rasio Derajat Desentralisasi dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dalam memengaruhi alokasi belanja modal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data dan interpretasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial, Derajat Desentralisasi tidak menunjukkan kontribusi signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintah Provinsi wilayah Pulau Sumatera. Sebaliknya, Efisiensi Keuangan Daerah dan Likuiditas Keuangan memberikan kontribusi negatif yang signifikan secara parsial terhadap Alokasi Belanja Modal di wilayah yang sama. Namun, secara simultan, ketiga variabel tersebut Derajat Desentralisasi, Efisiensi Keuangan Daerah, dan Likuiditas Keuangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Pulau Sumatera. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan, kebijakan tersebut belum mampu secara optimal mendorong peningkatan alokasi belanja modal. Oleh karena itu, evaluasi dari pemerintah pusat maupun daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan desentralisasi, khususnya dalam memperkuat kapasitas fiskal dan kewenangan daerah agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara otonom dan efisien. Pemerintah provinsi di Pulau Sumatera juga perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi keuangan dan kebutuhan investasi produktif agar efisiensi tersebut tetap berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Selain itu, penting untuk

memastikan bahwa dana kas yang tersedia tidak hanya disimpan sebagai saldo tinggi, melainkan digunakan secara optimal untuk mendukung inisiatif pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan ketelitian dan validitas hasil. Pertama, variabel independen yang digunakan masih terbatas sehingga hasil penelitian belum sepenuhnya mencerminkan berbagai faktor yang memengaruhi Alokasi Belanja Modal. Kedua, cakupan wilayah penelitian hanya terbatas pada pemerintah provinsi di Pulau Sumatera dengan periode waktu relatif pendek, sehingga belum menggambarkan dinamika belanja modal secara lebih luas dan mendalam. Ketiga, kajian ini hanya menggunakan data sekunder dari laporan keuangan dan publikasi resmi pemerintah tanpa melibatkan data primer sebagai pendukung. Berdasarkan keterbatasan tersebut, disarankan agar penelitian selanjutnya menambahkan variabel bebas lain untuk memperkaya analisis empiris. Selain itu, perluasan wilayah studi dan penggunaan data panel dengan periode yang lebih panjang akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika belanja modal di berbagai daerah. Penelitian lanjutan juga dianjurkan untuk mengombinasikan data sekunder dengan data primer, seperti wawancara atau survei langsung, guna meningkatkan akurasi dan validitas temuan penelitian.

Daftar Pustaka

- Assyifa, A. S. B., & Muttaqin, A. A. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pengalokasian Belanja Modal di Kabupaten dan Kota Nusa Tenggara Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 3(1), 16-28.
- Azimah, N. R. A., Fatihah, J. Q. A., & Marina, A. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2023 Dengan Metode Value For Money. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, 15(10).

- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis. *PT Rajagrafindo Persada*, 160.
- Christia, A. M. (2019). Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia. *Law Reform*.
- Machali, I. (2021). Metode penelitian kuantitatif (panduan praktis merencanakan, melaksanakan, dan analisis dalam penelitian kuantitatif).
- Mahmudi. (2016). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (Edisi ketiga). Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Praza, E. I. (2016). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 25-36.
<https://doi.org/10.22437/ppd.v4i1.3530>.
- Raharjo, E. (2018). Teori agensi dan teori stewardship dalam perspektif akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2(1).
- Rahmadini, D., Indriani, R., & Febriana, N. (2024). Pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2783-2795.
<https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2069>.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Rohyana, C., & Ramadhanti, D. D. (2024). Pengaruh rasio efisiensi dan rasio efektivitas PAD terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Jawa Barat. *Land Journal*, 5(2), 332.
- Saleh, Y. M., & S. A. (2020). Pengaruh rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SILPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 1–11.
- Sri Mulyani, H. F. (2023). Pengaruh rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio tingkat pembiayaan SILPA terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Sumatera Barat. *Jurnal Nuansa Karya Akuntansi*, 1(2).
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala Repository IMWI*, 3(1), 61-74.
- Rendy Armando Kakasih, George M. V. Kawung, S. Y. T. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara periode 2016-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(02).